

ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP KEANDALAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Muhammad Irfan Abdillah ¹

Supardi ²

Sukma Wijayanti ³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Pendidikan dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus ^{1, 2, 3}

Email: 32021070008@std.umku.ac.id ¹; supardi@umkudus.ac.id ²; sukmawijayanti@umkudus.ac.id ³

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of good governance, information technology utilization, and the role of internal audit on the reliability of local government financial reports in the OPD of Kudus Regency. This study involved 80 respondents and used purposive sampling techniques. OPD staff members who prepare financial reports were given questionnaires to complete in order to gather data. This research applies quantitative methods with associative research design, data analysis is done by multiple linear regression. The results showed that the use of good information technology and good management increased the reliability of financial statements. The role of internal audit is also significant in ensuring the reliability and accuracy of these reports. This research confirms the importance of synergy between good governance, supportive technology, and effective auditing to improve transparency and accountability in local financial management.

Keywords: *Good governance, information technology, internal audit, financial statement reliability*

ABSTRAKSI

Penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kabupaten Kudus. Penelitian ini melibatkan 80 responden dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Staf OPD yang menyiapkan laporan keuangan diberi kuesioner untuk diisi guna mengumpulkan data. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif, analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang baik dan manajemen yang baik meningkatkan keandalan laporan keuangan. Peran audit internal juga signifikan dalam memastikan keandalan dan akurasi laporan tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara tata kelola yang baik, teknologi yang mendukung, dan audit yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata-kata Kunci: *Good governance, teknologi informasi, audit internal, keandalan laporan keuangan*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik memiliki fungsi yang penting dalam rangka menciptakan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Pada tahun 2003 dimulai dengan ditandainya masa reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan munculnya paradigma yang radikal tentang akuntansi pemerintahan (Send & Wibowo, 2021). Di era modern ini, diperkenalkannya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah telah memicu tuntutan masyarakat agar laporan keuangan pemerintah yang baik dapat dihasilkan sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan publik (Irafah & Sari, 2020). Tatanan utama dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang asas-asas pengelolaan keuangan negara dan penerapan ketentuan pertanggungjawaban telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus berpedoman dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dalam menyajikan laporan keuangan, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (Hosana dkk., 2020).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah mengeluarkan hasil ikhtisar pemeriksaan Semester I Tahun 2024, tercatat 546 LKPD Tahun 2023, yang telah melaporkan sebagaimana yang disajikan oleh tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Opini LKPD Tahun 2023

No.	Opini	Jumlah	Persentase
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	493	90,3 %
2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	48	8,8 %
3	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	3	0,5 %
4	Tidak Wajar (TW)	2	0,4 %

Sumber: (Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pemerintah daerah memperoleh opini WTP, keberadaan opini WDP, TMP, dan TW menunjukkan bahwa masih terdapat daerah yang menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Hal ini menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. masih terdapat permasalahan dalam keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Opini yang telah didapatkan pemerintah Kabupaten Kudus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua belas tahun berturut-turut (Diskominfo Kudus, 2024). Walaupun sudah mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian selama 12 kali berturut turut, akan tetapi masih terdapat catatan dari Badan Pemeriksaan Keuangan mengenai LKPD Kabupaten Kudus dalam 5 tahun terakhir.

Permasalahan tersebut terjadi karena melemahnya sistem pengendalian internal dalam penyusunan LKPD dan ketidakselarasan terhadap peraturan perundang-undangan dalam membuat laporan keuangan daerah di beberapa akun, seperti akun aset tetap dan akun aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa capaian opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang bebas dari permasalahan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya permasalahan dalam pengelolaan laporan keuangan di instansi terkait. Beberapa pegawai diketahui mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku, yang dapat memengaruhi kualitas informasi yang disampaikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya integrasi sistem informasi akuntansi yang digunakan, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaporan. Di samping itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga audit internal juga menjadi kendala dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Dimulai dengan definisi tata kelola pemerintahan yang baik, penting untuk memberikan data yang terbaru dan dapat dipercaya dalam menjelaskan kinerja sektor publik, semua pihak perlu untuk meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan (Suprpto & Harmain, 2022). Dalam pengelolaan keuangan daerah prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keandalan merupakan elemen yang fundamental dalam menciptakan *good governance*. Dalam mewujudkan *good governance* tentunya memerlukan beberapa cara yang harus dilakukan, pegawai harus mampu memahami nilai-nilai dan tradisi birokrasi pemerintahan. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mulai memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan prinsip *good governance* di Indonesia tertuang dalam UU No. 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mencapai keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang diharapkan, penerapan *good governance* menjadi hal mutlak yang harus diterapkan di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi juga mempunyai dampak dalam memengaruhi keandalan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat diukur dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal (Rachmawati & Anik, 2020). Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menyediakan informasi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta informasi yang diperlukan

kepada masyarakat secara tepat waktu yang membantu manajemen publik untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengelolaan organisasinya dengan cara yang sempurna.

Kondisi perangkat keras, perangkat lunak, pemutakhiran data, sumber daya manusia, dan keterbatasan finansial merupakan beberapa hambatan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hambatan ini dapat menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal di organisasi pemerintah, yang dapat membahayakan keakuratan penyajian laporan keuangan daerah (Yuniar dkk., 2023). Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pemanfaatan teknologi informasi harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai. Pemerintah daerah perlu melakukan investasi yang signifikan dalam pelatihan aparatur di bidang teknologi informasi dan pengelolaan keuangan, serta memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah daerah juga harus memperhatikan sistem pengawasan yang kuat, guna mencapai tingkat keandalan penyajian laporan keuangan daerah salah satunya melalui peran audit internal. Audit internal memegang peranan penting untuk melaksanakan mekanisme pengawasan yang bertugas sebagai penilai dan pemeriksa keakuratan serta keandalan laporan keuangan. Fungsi audit internal di pemerintah daerah memastikan para pegawai yang ada di bagian keuangan mencatat semua transaksi keuangan dengan benar dan mematuhi peraturan yang berlaku. Membangun kepercayaan pemangku kepentingan merupakan alasan lain mengapa audit internal sangat penting untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan. Kepercayaan pemangku kepentingan akan meningkat ketika audit internal melakukan tugasnya dengan cara terbuka dan terdokumentasi dengan baik mengenai keakuratan data keuangan yang diberikan perusahaan. Oleh karena itu, bagi para praktisi, akademisi, dan mereka yang berkecimpung dalam manajemen organisasi, pemahaman menyeluruh tentang bagaimana audit internal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sangatlah penting (Wahyuni dkk., 2024)

Latar belakang yang mendasari penelitian ini karena adanya research gap pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian dari I Gusti Ayu Nyoman Budiasih tentang "Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. Pada penelitian Ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada OPD dipengaruhi oleh semua komponen variabel penelitian (Gita Saraswati & Budiasih, 2019). Sedangkan pada penelitian Zumar & Haryanto (2021)

menyimpulkan bahwa good governance kurang memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya mengenai pemanfaatan teknologi informasi penelitian dari Yuniar dkk. (2023) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi berdampak positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian Winarni dkk. (2020) menyebutkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi belum sepenuhnya membaik dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIPKD) maupun penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dampak audit internal terhadap penyajian laporan keuangan pada penelitian Zumaira & Rahmawaty (2022), menjelaskan bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPK Kota Banda Aceh. Kemudian pada penelitian (Irafah & Sari, 2020). Peran Internal Audit memengaruhi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan hal ini menunjukkan bahwa terjadinya hasil yang *inkonsisten* sehingga diperlukan analisis lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Dalam konteks teori agensi, hubungan antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* menggambarkan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keandalan penyajian laporan keuangan. Teori keagenan dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah, berkenaan dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini bertindak sebagai lembaga yang berkewajiban untuk menyediakan informasi pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai manfaat para pengguna informasi keuangan pemerintah daerah (Asyafiah dkk., 2023). Masyarakat membutuhkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi untuk menilai kinerja pemerintah dan memastikan penggunaan anggaran sesuai tujuan. Namun, masalah keagenan (*agency problem*) dapat terjadi ketika kepentingan pemerintah sebagai agen tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, misalnya dengan menyajikan laporan keuangan yang kurang akurat untuk menyembunyikan inefisiensi. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat, menjadi solusi penting. Memanfaatkan teknologi informasi yang efektif dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Teknologi informasi memungkinkan pencatatan, pengolahan, dan penyajian data

keuangan secara real-time dan terstandar, sehingga mengurangi risiko manipulasi data atau penyajian informasi yang bias. Hal ini membantu *principal* untuk memperoleh laporan keuangan yang andal dan relevan. Selain itu, mekanisme pengendalian, seperti audit internal dan eksternal, berperan dalam memastikan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat dijelaskan menggunakan teori agensi, yang diperkuat oleh mekanisme *governance* dan pengawasan, dapat memengaruhi kualitas dan keandalan penyajian laporan keuangan. Keandalan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan *Good Governance*

Good governance mempunyai arti tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem nilai, kebijakan, dan lembaga yang menekankan transparansi dan nilai-nilai baik dalam interaksi dengan semua sektor publik (Sipayung & Wahyudi, 2022). Pemerintah daerah harus memahami betul bagaimana tata cara pengelolaan keuangan yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah daerah diyakini dapat membuat penyajian keuangan yang berkualitas. Menurut UNDP (1997) dikutip dari (Maharani 2021), menjelaskan bahwa partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategi merupakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut Achmad (2022) *Good Governance* memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, (2) Adanya kewajiban untuk menyajikan informasi secara transparan, dan mempunyai daya tanggap yang tinggi dalam melakukan pelayanan atau menerima saran dan kritik masyarakat, (3) Sumber daya yang digunakan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (4) Mempunyai visi yang strategis dan sudut pandang luas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, (5) Dalam proses pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya pembangunan, kepentingan masyarakat yang dinilai lemah harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik.

H1: Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus disajikan dengan lebih andal jika tata kelola yang baik diterapkan.

Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk membantu individu dan organisasi dalam membuat, menyimpan, mengolah, dan

menyebarkan informasi (Laudon, 2020) Penggunaan teknologi informasi saat ini memainkan peran yang krusial dalam upaya meningkat kualitas laporan keuangan. Di era digitalisasi ini, teknologi informasi memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan data keuangan, seperti meningkatkan efisiensi, ketepatan, akurasi, dan transparansi dalam penyusunan laporan. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola data keuangan dengan lebih baik melalui sistem yang terotomatisasi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan manusia dalam penginputan dan pengolahan data keuangan. Menurut Jurnal dan Supomo (2002), tingkat integrasi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas akuntansi mencakup hal-hal berikut: (1) Divisi akuntansi dan keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melakukan tugas, (2) Unit kerja telah terhubung ke jaringan internet, (3) Jaringan komputer ini digunakan untuk menghubungkan antara satu sama lain untuk mengirimkan data dan informasi yang dibutuhkan, dan proses akuntansi mulai dari awal tahun. (Ishak & Syam, 2020). Hal ini diperkuat pada penelitian Rachmawati & Anik (2020) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian Shinta dkk. (2020) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan prinsip *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

Fungsi Audit Internal

Audit internal merupakan suatu proses yang bebas dan faktual yang dilakukan oleh seorang auditor untuk memberi penilaian dan memastikan bahwa pengendalian internal organisasi berfungsi dengan baik dan efektif. Audit internal juga mempunyai tugas pokok terhadap pengawasan dan evaluasi kebijakan, dan prosedur di suatu organisasi. Selain itu, audit internal memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wahyuni dkk., 2024). Audit internal memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan secara efektif melalui berbagai aspek utama. (1) Audit internal melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal guna memastikan aset perusahaan terlindungi, laporan keuangan dikelola dengan akurat, dan kepatuhan terhadap regulasi dipenuhi. (2) Audit internal menilai efisiensi dan efektivitas operasional organisasi untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. (3) audit internal berfungsi dalam penilaian risiko, baik risiko keuangan, operasional, maupun strategis, yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. (4) Penilaian kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan internal, dan standar etika yang berlaku, (5) Auditor internal memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis,

sistem pengendalian, maupun kebijakan organisasi, (6) Auditor membuat pelaporan kepada manajemen atau pihak berkepentingan lainnya dalam bentuk laporan yang memuat temuan dan langkah perbaikan yang diusulkan, (7) Audit internal juga melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap implementasi rekomendasi untuk memastikan perbaikan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan penelitian Irafah & Sari (2020) yang menyatakan peran audit internal berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.

H3: Peran audit internal berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus

Pengaruh penerapan *good governance*, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi audit internal terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah

Keandalan penyajian laporan keuangan harus memenuhi standar yang berlaku, untuk membentuk kepercayaan publik dan lebih bermanfaat dan berdaya guna. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah standar yang harus ditetapkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuan. Agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diharapkan, empat kriteria standar ini diperlukan, yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Penerapan good governance dalam sektor publik, khususnya di pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan, karena sebagai upaya pemerintah daerah dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan akurat.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah juga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan. Teknologi informasi dapat memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien, cepat, dan akurat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu lembaga dapat memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila teknologi informasi digunakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dapat mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi kesalahan perhitungan karena menggunakan metode komputerisasi dalam menghasilkan laporan keuangan (Yarahim dkk., 2023).

Audit internal memainkan peran kunci dalam memastikan keandalan laporan keuangan dengan melakukan evaluasi, pengawasan, dan verifikasi terhadap penyusunan

laporan keuangan. Efektivitas audit internal berkorelasi langsung dengan mutu laporan keuangan organisasi. Pemahaman yang menyeluruh mengenai semua aspek organisasi sangat penting untuk meningkatkan efektifitas kinerja audit internal (Sukandani dkk., 2024). Audit internal juga berperan dalam memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan keandalan pelaporan. Penelitian (Wahyuni, Aini, Isnaini, Sholeha, Putri, Permatasari, dkk., 2024) menunjukkan bahwa peran audit internal memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas laporan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H4: Penerapan good governance, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu observasional kuantitatif dengan design penelitian asosiatif. Pada penelitian ini mengamati tentang penerapan *good governance*, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi audit internal dengan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kudus. Sampel diambil sejumlah 80 responden dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pemberian pernyataan kepada responden melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan *skala likert*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan *tools SPSS 26 (Statistical Packet for Social Science) for Windows*. Persamaan umum regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon \quad (1)$$

Dimana : Y = Variabel terikat, α = Konstanta, X_1, X_2, X_3 = Variabel Bebas, ϵ = Residual

HASIL PENELITIAN

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas semua item kuesioner dinyatakan reliabilitas (handal), seperti yang terlihat di tabel 2. Hasil uji validitas berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*, menunjukkan keempat variabel penelitian yaitu penerapan good governance, penggunaan teknologi informasi, fungsi audit internal, dan keandalan penyajian laporan keuangan daerah menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 0,60. Dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa seluruh jawaban responden terhadap semua

variabel penelitian dapat dikatakan reliabel, kemudian hasil kuesioner dapat digunakan untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Penerapan <i>Good Governance</i>	0,967	Reliabel
2	Penggunaan Teknologi Informasi	0,938	Reliabel
3	Fungsi Audit Internal	0,947	Reliabel
4	Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,972	Reliabel

Sumber: Hasil penelitian, 2025

Uji Asumsi Klasik

Pengujian berikutnya menggunakan uji asumsi klasik untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik pada suatu model regresi. Uji asumsi klasik yang dipenuhi dalam sebuah model regresi berganda diantaranya yaitu; uji normalitas, uji heteroskedastitas, dan uji multikolinearitas. Peroleh hasil dari hasil uji asumsi klasik disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Keterangan
Uji Normalitas (<i>Kolmogorov Smirnov</i>)	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> = 0,086	Memenuhi asumsi normalitas
Uji Multikolinearitas	Nilai VIF < 10 Yaitu 3,503 – 3,698 Nilai <i>Tolerance</i> > 0,10 Yaitu 0,270 – 0,285	Memenuhi asumsi multikolinearitas
Uji Heteroskedastitas	Nilai sig. semua variabel > 0,05 yaitu 0,164 – 0,893	Memenuhi asumsi heteroskedastitas

Sumber: Hasil penelitian, 2025

Dari tabel 3 dijelaskan bahwa uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,086 > alpha 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji multikolinearitas pada tabel di atas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 yaitu di rentang 3,503 – 3,698 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yaitu 0,270 – 0,285, jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastitas pada tabel 3 menunjukkan nilai sig. semua variabel lebih dari 0,05 yaitu di rentang 0,164 – 0,893. Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, maka peneliti selanjutnya menggunakan Uji analisis regresi linier berganda untuk digunakan menganalisis penerapan *good governance*, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi

audit internal terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Uji regresi linear berganda Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Teknik ini membantu dalam menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat.

Uji Regresi

Tabel 4 merupakan ringkasan pengujian regresi yang terdiri dari uji F, uji *Adjusted R Square*, dan uji t. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,00 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak untuk diteliti. Nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,748. Artinya bahwa variabel bebas yaitu variabel penerapan *good governance*, penggunaan teknologi informasi, dan peran audit internal mampu menjelaskan variabel terikat yaitu keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74,8%, dan sisanya yaitu sebesar (100% - 74,8% = 25,2%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Uji Regresi

Model	B	sig	kesimpulan
F significant	0,000		
Adjusted R Square	0,748		
1 (Constant)	0,247	0,827	
Penerapan <i>Good Governance</i> (X1)	0,286	0,000	diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,390	0,000	diterima
Peran Audit Internal (X3)	0,155	0,009	diterima

Sumber: Hasil penelitian, 2025

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil tabel 4, maka dapat dibuat persamaan regresi linear yang mencerminkan hubungan antara variabel – variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{Keandalan Penyajian Laporan} = 0,247 + 0,286 \text{ PGG} + 0,390 \text{ PTI} + 0,155 \text{ PAI} + e$$

Hasil persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Variabel penerapan *good governance*, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi audit internal memiliki pengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Konstanta sebesar 0,247 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen bernilai nol, maka tingkat keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah akan tetap naik sebesar 0,247. (2) Variabel penerapan *good*

governance dengan koefisien regresi sebesar 0,286 memiliki arti bahwa semakin tinggi penerapan *good governance*, semakin baik tingkat keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Variabel penggunaan teknologi informasi dengan koefisien regresi sebesar 0,390 menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. (4) Variabel peran audit internal dengan koefisien regresi sebesar 0,155 mengindikasikan bahwa semakin besar peran audit internal, semakin baik pula keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara positif mendukung peningkatan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima, karena hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi (*sig t*) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari *alpha* 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus sudah menerapkan *good governance* dengan baik dalam penyajian laporan keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance*, semakin tinggi juga keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan ini mencerminkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus telah mengimplementasikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. Misalnya, transparansi diterapkan dengan menyediakan akses informasi keuangan yang jelas dan dapat diandalkan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan turut memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan meminimalkan pemborosan.

Dalam undang-undang di Indonesia penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam Pasal 28 3 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara tertib, patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, berdaya guna, dengan memperhatikan kewajiban, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Kementerian Keuangan, 2023). Dengan demikian, maka penerapan *good governance* dapat memengaruhi keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Erawati dkk., 2021) yang menjelaskan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.

Selanjutnya, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa terdapat dampak positif dari Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap akurasi penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Dapat dibuktikan dengan hasil pengujian yang menunjukkan nilai sig (0,000) < α 0,05 dan bertanda positif. Sehingga dapat diartikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk menunjang penyajian laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan mencakup penggunaan aplikasi, sistem, dan perangkat lunak yang mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian data keuangan. Teknologi informasi membantu memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, konsisten, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan penyimpanan data yang lebih aman dan sistematis, meminimalkan risiko kehilangan atau manipulasi data.

Hasil ini mencerminkan bahwa OPD di Kudus telah berhasil memanfaatkan teknologi informasi dengan baik untuk menunjang pelaporan keuangan yang andal. Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS) untuk mengelola penatausahaan keuangan daerah yang dirancang untuk mengelola anggaran, realisasi, dan pelaporan keuangan secara terintegrasi. Teknologi ini juga memungkinkan audit trail yang transparan, sehingga mempermudah proses audit oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan Pemanfaatan teknologi informasi dapat lebih cepat dan mudah dalam mengerjakan laporan keuangan. Selain itu memanfaatkan teknologi informasi juga untuk membantu melakukan pencatatan operasional pemerintahan agar lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan penyusunan laporan keuangan (Risnawati & Ningrum, 2023). Dengan demikian, maka pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah juga terbukti, dengan hasil uji t menunjukkan nilai sig t sebesar 0,009, yang lebih kecil dari α 0,05. Dengan demikian, semua hipotesis dalam penelitian ini diterima, dan hasilnya mendukung pengaruh positif dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen. Audit internal memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan memastikan adanya pengendalian internal yang efektif, identifikasi risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Dengan

keterlibatan aktif auditor internal dalam memantau proses keuangan, akan menghasilkan hasil audit yang sesuai dengan aturan pelaksanaan audit internal, sehingga menghasilkan hasil audit yang terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajian laporan keuangan (Bangki, 2023). Dalam konteks pemerintah daerah, hal ini mencakup evaluasi penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan, transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta peningkatan akuntabilitas kepada masyarakat.

Secara praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa audit internal yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah, memperkuat akuntabilitas, serta mencegah potensi kesalahan dan fraud. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dalam penelitian ini sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai audit internal pemerintah daerah, dengan memberikan pemeriksaan dan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan terstruktur dan sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasan dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dalam penelitiannya menyimpulkan audit internal dapat membantu mengevaluasi efektivitas system pengendalian internal dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, memastikan bahwa proses penyajian laporan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi *Financial Management Information System* (FMIS), membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi proses pengelolaan data keuangan. Teknologi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan yang lebih akurat dan tepat waktu. Sementara itu, peran audit internal sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Audit internal juga membantu mendeteksi kesalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum laporan dipublikasikan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* penggunaan teknologi informasi dan fungsi audit internal secara signifikan berpengaruh terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance*, semakin tinggi keandalan laporan keuangan, mencerminkan implementasi tata kelola yang baik oleh OPD di Kudus. Pemanfaatan teknologi informasi juga berdampak positif, mengindikasikan keberhasilan OPD dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaporan keuangan yang andal. Selain itu, peran audit internal yang efektif berkontribusi secara signifikan dalam memastikan kualitas, transparansi, dan keakuratan laporan keuangan, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Secara simultan, ketiga faktor ini berpengaruh bersama-sama terhadap keandalan laporan keuangan, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat *good governance*, memaksimalkan teknologi informasi, dan meningkatkan efektivitas audit internal secara berkelanjutan demi menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I. N. (2022). *Mengenal Karakteristik Good Governance Melalui Model Discovery Learning* (P. Wahyuningsih, Ed.; Cetakan Pertama). Mikro Media Teknologi.
- Asyafiah, P., Simanjuntak, B. H., Sosial Provinsi DKI Jakarta, D., & Trisakti, U. (2023). The Moderating Role of The Government Internal Control System on Factors Influencing the Quality of Local Government Financial Reports. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6 (1), 181–198. <https://doi.org/10.29303/AKURASI.V6I1.356>.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024* (Vol. 260). Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- Bangki, R. (2023). Evaluasi Kinerja Auditor Dalam Mendeteksi dan Mencegah Terjadinya Potensi Fraud (Kecurangan). Dalam *MARS Journal* (Vol. 3, Nomor 1). <https://jurnal.ilrscentre.or.id/index.php/mars>.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *OPTIMAL*.

- Diskominfo Kudus. (2024). *Pemkab Kudus Raih Opini WTP Ke-12 Kali Beruntun*. Juni 3. <https://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/berita/id/pemkab-kudus-raih-opini-wtp-ke12-kali-beruntun>.
- Erawati, T., Primastiwi, A., & Khairunnas. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3.
- Gita Saraswati, I. G. A., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 2268. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p23>
- Hasan, A. F., Alam, S., & Pramukti, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Staf Keuangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (4), 2051–2067. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/3698>.
- Hosana, A. T., Rispanyo, & Widarno, B. (2020). *Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Karanganyar)*. <https://timlo.net/baca/37179/>.
- Irafah, S., & Nurmala Sari, E. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8 (2), 337–348. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.21775>.
- Ishak, P., & Syam, F. (2020). *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review Pengaruh Kompetensi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES*. 1(2). <https://jtebr.unisan.ac.id>
- Kemenkeu. (2023). *Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penerapan-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah-55ed28e8/detail/>.
- Laudon;, K. C. L. J. P. (2020). *Ebook: Management Information Systems: Managing The Digital Firm, 16 th Edition*. Pearson Education. [//opaclib.inaba.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D2812%26keywords%3D](http://opaclib.inaba.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D2812%26keywords%3D).
- Maharani, Mufti Rahajeng. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4 (2), 163–174. <https://doi.org/10.20884/1.PPMI.2020.4.2.3912>.
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020). *pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance dan*

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
www.bpk.go.id.

- Risnawati, H., & Ningrum, N. P. (2023). Pengaruh Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*.
- Send, Z. V., & Wibowo, P. (2021). Perkembangan Penelitian Akuntansi Pemerintah Pada Dua Jurnal Nasional Terakreditasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 163–182. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/1554>.
- Shinta, I., Sri, P., Sriyono, S., Veteran, U. ", & Yogyakarta, ". (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). *Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas*. 6, 14323–14334.
- Sukandani, Y., Qurrotu Aini, A., Andriani, L., Sri Wahyuni, A., Hidayanti, R., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2024). Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Suatu Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(6), 361–368. <https://doi.org/10.62017/jemb>.
- Suprpto, S., & Harmain, V. (2022). Penerapan Prinsip Good Governace dalam Pelayanan Administrasi Bidang Bina Marga Application of the Principle of Good Governace in Administrative Services in the Field of Wildlife Development. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2, 985–994. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i07.404>.
- Wahyuni, A., Aini, N., Isnaini, P., Sholeha, P., Putri, R. A., Permatasari, Y., & Aliah, N. (2024). Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4 (1), 78–87. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art9>
- Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 5 (2), 289. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.197>
- Yarahim, B., Kunci, K., Kualitas, :, Keuangan, L., Informasi, T., Sumber, K., & Manusia, D. (2023). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Distributor Pertanian Di Kota Pekanbaru* (Vol. 3).
- Yuniar, L. S., Gunarsa, A., Asdar, F., Ralis, G., Ramadhani, A. P., & Buntulabi, D. R. (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah). *Owner*, 7 (2), 1017–1025. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1313>

- Zumaira, T., & Rahmawaty, R. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpk Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7 (4), 508–519. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/20662>.
- Zumar, A., & Haryanto, H. (2021). Studi Pada Seluruh Skpd Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10 (4), 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.